

# EVALUASI PROGRAM TANGGUNGAN BUNGA PINJAMAN BAGI USAHA MIKRO DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Intan Pandini Utami  
NPP. 32.0619

*Asdaf Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat*  
*Program Studi Studi Kebijakan Publik*  
Email: [32.0619@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0619@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Merintha Suryapuspita, S.AP., M.KP

## ABSTRACT

**Problem Statement:** *This study begins with the economic conditions of North Lombok Regency which are not good when compared to other regencies in NTB Province and in the recovery after the 2018 earthquake and the COVID-19 pandemic. The author focuses on one of the loan interest coverage programs for micro businesses which is one of the leading programs in North Lombok Regency.*  
**Purpose:** *This program aims to help improve the economy in the region through MSMEs. This study aims to analyze and describe how the loan interest coverage program for micro businesses is from an evaluation perspective.*  
**Metode:** *The researcher conducted this study using a qualitative method with two data collection techniques, namely by interviewing 14 informants and documentation.*  
**Result:** *The researcher found that all dimensions of the theory used by the researcher were sufficient. The context dimension underlying this program is quite clear. The input dimension which is a supporter is quite adequate. The process dimension, namely the stages in its implementation, has been carried out well, and the product dimension which is the result of the program has reached the target and provided benefits to various parties.*  
**Conclusion:** *The evaluation of the loan interest coverage program for micro businesses in North Lombok Regency can be said to be good, because all dimensions that are the researcher's measuring tools are in good condition and there are no major obstacles or can hinder the process of achieving targets or goals. However, the Cooperatives, SMEs, Industry and Trade Service of North Lombok Regency together with PT BPR NTB Perseroda continues to conduct periodic evaluations and make efforts to optimize this program.*

**Keywords:** *MSME, Loan, Interest*

## ABSTRAK

**Permasalahan:** Pada penelitian ini diawali dengan kondisi ekonomi Kabupaten Lombok Utara yang belum baik jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi NTB dan dalam pemulihan pasca gempa bumi 2018 serta pandemi COVID-19. Penulis berfokus salah satu program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro yang merupakan salah satu program unggulan di Kabupaten Lombok Utara. **Tujuan:** Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian di daerah melalui UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro ini dalam perspektif evaluasi. **Metode:** Peneliti melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan

mewawancarai 14 narasumber serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Peneliti menemukan bahwa keseluruhan dimensi dari teori yang digunakan peneliti sudah cukup. Dimensi context yang mendasari program ini sudah cukup jelas. Dimensi input yang merupakan pendukung sudah cukup memadai. Dimensi process yaitu tahapan dalam pelaksanaannya telah terlaksana dengan baik, serta dimensi product yang merupakan hasil dari program sudah mencapai target dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. **Kesimpulan:** Evaluasi program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara dapat dikatakan baik, karena keseluruhan dimensi yang menjadi alat ukur peneliti dalam kondisi yang baik dan tidak adanya hambatan yang besar atau dapat menghambat proses pencapaian target atau tujuan. Walaupun demikian Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara bersama PT BPR NTB Perseroda tetap melakukan evaluasi berkala dan melakukan upaya upaya dalam mengoptimalkan program ini.

**Kata kunci:** UMKM, Pinjaman, Bunga

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 5.05 persen, dimana pada tahun sebelumnya mencapai 5,31 persen. Oleh karena itu momentum positif di Indonesia harus dijaga melalui stabilitas, pertumbuhan berkelanjutan, perlindungan terhadap masyarakat rentan, dan percepatan reformasi structural (Sipayung, 2024). Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah bergantung pada bagaimana pembangunan ekonomi di daerah dilakukan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada, membentuk hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta, menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di daerah tersebut (Supriyanto, 2024).

Perekonomian daerah umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala mikro kecil dan menengah yang ada di daerah itu sendiri. UMKM merupakan salah satu prioritas pengembangan karena besarnya peran yang diberikan khususnya pada bidang ekonomi dan sosial. Selain meningkatkan perekonomian, UMKM berperan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan disektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat khususnya di daerah (Alimi, 2024).

Sebagian besar UMKM di Indonesia lebih dominan pada kegiatan usaha yang berbasis pada rumah tangga sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Lisnawati, T (2023), terdapat 66 juta UMKM. Dengan jumlah unit yang banyak tersebut tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi UMKM akan sangat besar terhadap penurunan angka pengangguran. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5% dan penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Ini menunjukkan bahwa adanya urgensi untuk mengembangkan UMKM di Indonesia sehingga dapat memberikan peran baik dalam perekonomian. UMKM mengemban peran penting dalam perekonomian daerah di Indonesia. UMKM tidak hanya mempengaruhi atau berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menjadi salah satu ajang dalam pembukaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di daerah.

Daerah dengan PDRB pada posisi tertinggi dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, sedangkan posisi tiga terendah adalah NTT, Maluku dan NTB (databoks.katadata.co.id, 2023). Jika dibandingkan dengan provinsi dengan PDRB tertinggi

sangat terlihat kesenjangan, yakni PDRB tertinggi berkisar dari 190-300 ribu rupiah sedangkan PDRB terendah hanya berkisar pada 20-30 ribu rupiah.

Salah satu provinsi yang masuk pada urutan tiga PDRB terendah di Indonesia adalah Provinsi NTB. Namun, Menurut Badan Pusat Statistik (2022), jumlah usaha mikro di Provinsi NTB menempati urutan keempat terbanyak di Indonesia, yakni 131.958 unit. Hal ini menandakan bahwa adanya tantangan yang dihadapi oleh Provinsi NTB dalam meningkatkan PDRB Provinsi NTB dengan mengembangkan usaha mikro yang ada. Dengan banyaknya usaha mikro yang ada di Provinsi NTB seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi pendukung dalam meningkatkan PDRB.

Tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola UMKM terdiri dari beberapa hal. Namun saat ini salah satu faktor utama yang tidak bisa lepas adalah faktor dari bencana alam gempa bumi dan Pandemi COVID-19. Gempa bumi telah terjadi sejak tahun 2018, namun saat masa pemulihan pasca gempa, dilanjutkan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB tidak berjalan maksimal. Seluruh wilayah kabupaten di Provinsi NTB merasakan dampak yang diakibatkan oleh dua fenomena tersebut, utamanya adalah Kabupaten Lombok Utara yang merupakan pusat gempa pada tahun 2018 sehingga memiliki kerusakan yang paling parah di Provinsi NTB. Kemudian munculnya wabah COVID-19 yang sebelumnya kondisi UMKM dirasa cukup baik dan setelah adanya wabah satu per satu toko, retail, jasa pariwisata, UMKM di NTB khususnya Lombok Utara menutup operasional usahanya (Hidayanti & Mandalika, 2022).

Data dari Badan Pusat Statistika Provinsi NTB (2022) menerangkan mengenai PDRB menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB bahwa pada Tahun 2022 Kabupaten Lombok Utara berada pada posisi kedua terbawah PDRB di Provinsi NTB sebelum Kota Bima (Badan Pusat Statistik NTB, 2022). Hal ini menjadi salah satu pertanda bahwa memang diperlukannya peningkatan pengembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara membuat sebuah program yakni Program Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro dengan mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Utara No 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah Lombok Utara menginisiasikan program ini berfokus pada usaha mikro yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Usaha mikro dikhususkan dalam program ini untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu perangkat daerah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program Tanggungan Bunga Pinjaman bagi usaha mikro yang berada dibawah naungan dinas ini. Dalam hal ini, terdapat tiga pihak yang terlibat yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Lembaga keuangan dan masyarakat atau pelaku usaha. Dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara bekerja sama dengan salah satu lembaga keuangan yaitu PT BPR NTB Perseroda. PT BPR NTB Perseroda ini berperan sebagai pihak ketiga atau lembaga keuangan yang akan memberikan kontribusi dalam pemberian pinjaman bagi usaha mikro yang ingin mengajukan tanggungan bunga pinjaman ini

Peneliti akan berfokus untuk mengevaluasi program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara yang ada dibawah naungan Dinas UKM, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Lombok Utara. Sejak tahun 2022, dimana program ini baru berjalan, pemerintah

Kabupaten Lombok Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp.700.000.000, pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000 dan pada tahun 2024 telah dianggarkan sebanyak 2 milyar rupiah. Dapat dilihat bahwa terjadinya kenaikan jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk menjalankan program ini. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam menjalani program ini.

Melalui surat pra-penelitian, peneliti mendapatkan data awal mengenai jumlah pemohon sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 (per oktober 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa sejak dilaksanakannya program ini masih banyak pemohon yang belum mendapat tanggungan pinjaman dan masuk kedalam daftar tunggu atau *waiting list* ditahun selanjutnya. Mekanisme *waiting list* ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi keadilan dalam distribusi dana. Kemudian bagi UMKM yang mungkin membutuhkan dana segera akan menghambat perkembangannya. Data diatas juga menunjukkan bahwa terlihat kesenjangan antara jumlah proposal tanggungan pinjaman yang masuk dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga akan timbul dilema saat proses seleksi dan penyaluran pinjaman,

Banyaknya pemohon yang dianggap tidak layak ini menandakan bahwa pemohon atau pelaku usaha tidak mengetahui kriteria atau tidak tersosialisasikan dengan benar apa saja yang menjadi kriteria untuk mendapatkan subsidi pinjaman ini. Selanjutnya data dan keterangan yang peneliti dapatkan melalui surat penelitian menunjukkan bahwa belum ada target secara jelas yang mengatur kuota atau jumlah usaha mikro yang akan mendapatkan tanggungan bunga pinjaman ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai berapa jumlah usaha mikro yang akan mendapatkan tanggungan bunga setiap tahunnya yang dibuktikan adanya banyaknya usaha yang berada dalam daftar tunggu disetiap tahunnya. Petunjuk teknis pelaksanaan Kredit Tanggungan Bunga Pinjaman di Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disebutkan pada bagian II Mekanisme Pelaksanaan poin ke 4 yakni kelayakan pemberian pinjaman diserahkan sepenuhnya kepada penilaian pemohon tanggungan oleh pihak bank dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tidak berkontribusi dalam proses penilaian penentuan penerima tanggungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada campur tangan pemerintah dalam penilaian kelayakan usaha mikro yang akan mendapatkan tanggungan bunga pinjaman dan berpotensi menimbulkan pertanyaan dalam transparansi penentuan penerima tanggungan bunga pinjaman ini, serta persyaratan kelayakan dan mekanisme penilaian sudah seharusnya diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dari uraian permasalahan yang terjadi pada program ini meliputi tidak adanya target dan kriteria prioritas penerima tanggungan, adanya mekanisme yang kurang jelas berupa mekanisme *waiting list* serta kurangnya transparansi pada penentuan penerima oleh pihak bank. Beberapa permasalahan tersebut membuat peneliti ingin menganalisis bagaimana evaluasi dari Program Tanggungan Bunga Pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara dikarenakan permasalahan yang dihadapi ini tidak berfokus pada satu hal saja namun masalah yang terjadi terdapat pada proses pelaksanaannya serta kelengkapan program itu sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai Evaluasi Program Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Lombok Utara

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian menunjukkan pentingnya pendampingan terhadap UMKM dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Dalam kajian mengenai penguatan dan pendampingan

pelaku UMKM di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat, ditemukan bahwa terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti mindset negatif yang mengakar dan terbatasnya pengetahuan tentang desain kemasan produk serta pengurusan izin usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat di desa tersebut memberikan dampak positif dengan terbitnya izin usaha serta desain kemasan baru untuk produk-produk lokal, seperti keripik dan cemilan kampung, yang dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar (Wulandari, 2023). Sementara itu, sebuah penelitian mengenai peran orientasi pasar hijau dan inovasi hijau dalam kinerja bisnis UMKM menunjukkan bahwa orientasi pasar hijau memiliki dampak positif terhadap kinerja bisnis. Penelitian yang melibatkan 175 responden dari UMKM manufaktur di Provinsi Jawa Timur ini memberikan bukti empiris bahwa pengelolaan bisnis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi hijau dapat memperbaiki kinerja UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan yang semakin berkembang (Tjahjadi et al., 2020). Penelitian lain juga menekankan pentingnya faktor manajerial dalam penerapan inovasi berkelanjutan. Salah satu studi yang mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi dalam penerapan praktik inovasi berorientasi berkelanjutan (SOI) di UMKM manufaktur menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak, inisiatif pemerintah, dan sumber daya keuangan adalah faktor utama yang membantu penerapan praktik-praktik ini. Temuan ini memberikan gambaran tentang pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta dalam mendukung UMKM agar lebih berkelanjutan (Khurana et al., 2021). Sebagai tambahan, penelitian yang berfokus pada hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi praktik ekonomi sirkular menemukan adanya tujuh dimensi hambatan yang signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya dan pemahaman tentang ekonomi sirkular itu sendiri. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mendukung UMKM agar bisa mengimplementasikan praktik ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan (Mishra et al., 2022). Dalam konteks lain, studi mengenai UMKM di industri mode di Inggris menyoroti pentingnya kemampuan dinamis dan keterlibatan pelanggan dalam memajukan ekonomi sirkular. Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM dapat memperkenalkan solusi ekonomi sirkular melalui inovasi dan adaptasi bisnis yang lebih gesit, sambil melibatkan pelanggan dalam proses bisnis mereka. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur ekonomi sirkular dan menunjukkan bahwa keterlibatan pelanggan dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi ekonomi sirkular (Elf et al., 2022). Sementara itu, studi mengenai kewirausahaan hijau dalam ekonomi sirkular mengungkapkan bahwa pendorong utama dalam mengembangkan kewirausahaan hijau adalah teknologi, infrastruktur yang efektif, serta norma dan budaya sosial yang mendukung penerimaan teknologi baru. Penelitian ini menyoroti bahwa keberhasilan implementasi kewirausahaan hijau tidak hanya bergantung pada faktor teknologi, tetapi juga pada aspek sosial dan kebijakan yang mendukungnya. Hal ini penting bagi UMKM yang ingin mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasional mereka (Mondal et al., 2023a). Selain itu, penelitian yang menganalisis literasi keuangan di UMKM tekstil di Jawa dan Bali menemukan bahwa literasi keuangan yang baik dapat berpengaruh signifikan terhadap inovasi dan kinerja bisnis UMKM. Literasi keuangan yang kuat membantu pelaku UMKM membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis mereka di pasar global. Temuan ini juga menegaskan

perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, untuk memperbaiki literasi keuangan UMKM (Wahyono & Hutahayan, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti cukup relevan dengan penelitian ini. Penelitian Chyntia Utami Damayanti, Leo Agustino, dan Ima Maisaroh yang berjudul Evaluasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pada Pengrajin Tahu di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang, menemukan bahwa program ini belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dimensi context, aspek tujuan telah sesuai regulasi namun belum sesuai dengan kebutuhan pengrajin tahu. Dimensi input, aspek strategi berjalan dengan baik dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk menghemat anggaran, namun pada aspek rencana kerja terdapat ketidakjelasan SOP tertulis. Pada dimensi process terdapat perbedaan pendapat antar petugas terkait anggaran pelaksanaan program. Pada dimensi product hasilnya belum cukup baik karena belum meningkatkan pendapatan pengrajin tahu (Damayanti et al., 2023). Penelitian Suyono, Oksep Adhayanto, dan Rudi Subiyakto yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Modal Tanpa Bunga Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Program Bantuan Tanpa Bunga Untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan tujuannya yaitu agar pelaku UMKM dapat bertahan dari dampak COVID-19 (Suyono et al., 2024). Penelitian Rr. Forijati yang berjudul Analisis Model Evaluasi Pemberdayaan UMKM Di Kediri menunjukkan bahwa Model evaluasi pemberdayaan UMKM di Kediri dengan Model Evaluasi CIPP menempatkan seluruh dimensi CIPP yaitu context, input, process, dan product dalam kategori sangat baik (Forijati, 2014). Penelitian Alya Rihhadatul Aisy dan Nia Karniawati dengan judul Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa program ini sudah menunjukkan bahwa implementasi program sudah berjalan dengan baik, namun ditemukan beberapa hal yang perlu dievaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bandung (Aisy & Karniawati, 2024). Penelitian Isna Rahmadani, Simin, dan Dwiyanto Indihahono yang berjudul Implementasi Program Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, menyimpulkan bahwa program pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro belum sepenuhnya berhasil. Penerima pinjaman merasa sudah sangat terbantu, namun masih ada permasalahan dalam implementasinya (Rahmadani et al., 2020).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu bahwa pada penelitian diatas tidak terdapat persamaan lokus dengan lokus penelitian yang sedang peneliti lakukan. Walaupun terdapat persamaan, namun terlihat jelas bahwa adanya perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang sedang penliti lakukan. Penelitian ini lebih berfokus pada evaluasi program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara yang berada pada naungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lombok Utara.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Lombok Utara serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk oleh Dinas

Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Lombok Utara dan PT BPR NTB Perseroda dalam meningkatkan optimalisasi program tanggungan bunga pinjaman dalam mencapai tujuannya.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami arti individu atau grup yang dikaitkan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta, analisis data secara induktif dibangun dari hal-hal khusus hingga tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data (Simangunsong, 2013).

Penulis mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada 14 narasumber yang telah peneliti tentukan dengan metode purposive sampling. Narasumber ini terdiri dari dua narasumber dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan, empat narasumber dari pihak PT BPR NTB Perseroda, serta masyarakat yang menerima dan dinyatakan tidak layak menerima program tanggungan bunga pinjaman ini dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Kayangan yang merupakan kecamatan paling banyak dan paling rendah menerima program tanggungan pinjaman bagi usaha mikro ini.

Proses analisis data pada penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman dalam Nurdin & Hartati, (2019) yang terbagi menjadi tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan perspektif evaluasi oleh Stufflebeam dengan dimensi *context*, *input*, *process* dan *product* atau yang dikenal sebagai teori evaluasi CIPP (Stufflebeam & Coryn, 2014), serta upaya upaya yang dilakukan oleh lembaga pelaksana dalam mengoptimalkan proses pelaksanaan program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara. Adapun pembahasan yakni sebagai berikut.

### 3.1. Evaluasi Program Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Lombok Utara

Peneliti melakukan evaluasi terhadap program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro dengan empat dimensi CIPP oleh Stufflebeam, yakni:

#### a. Dimensi *Context*

Pada dimensi *context* terdapat empat indikator yang menjadi alat ukur penilaian dalam evaluasi program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro ini. Indikator yang pertama ialah masalah, peluang dan kebijakan. Pada indikator peluang, masalah, dan kebijakan peneliti menilai bahwa terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi dibuatnya program ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, yakni kondisi perekonomian Kabupaten Lombok Utara yang belum cukup baik serta adanya bencana gempa bumi tahun 2018 sehingga memberikan dampak yang cukup buruk pada sarana dan prasarana umum kemudian disusul dengan pandemi COVID-19 yang juga makin membuat kondisi daerah menjadi tidak stabil. Selain itu pihak PT BPR NTB Perseroda juga menambahkan bahwa adanya oknum-oknum koperasi atau bank harian yang menjadi tempat masyarakat meminjam uang dengan ketentuan cicilan setiap minggu atau hari.

Indikator kedua ialah tujuan dan sasaran, dimana program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro ini memiliki tujuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Utara No 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi usaha Mikro Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yakni memberikan kemudahan kepada pelaku usaha perorangan dan/atau kelompok dalam mendapatkan bantuan pinjaman, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemertaan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sasaran dari program ini juga telah jelaskan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara No 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi usaha Mikro Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yakni program ini diberikan kepada perorangan dan/atau kelompok, yang merujuk pada sektor usaha perdagangan, industri rumah tangga, pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa lainnya.

Indikator ketiga dari dimensi *context* adalah kesiapan organisasi pelaksana. Kesiapan organisasi pelaksana ini merujuk pada bagaimana persiapan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara dan PT BPR NTB Perseroda dalam melaksanakan program tanggungan ini. Menurut salah satu narasumber peneliti yaitu Kepala Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara menyatakan bahwa dari pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara mempersiapkan regulasi, payung hukum serta prosedur pelaksanaan program ini. Terlepas dikatakan siap atau tidak siap akan harus dilakukan karena sudah diberikan tanggung jawab mengenai program ini. Walaupun awalnya belum ada regulasi atau prosedur dalam pelaksanaan program ini, Namun, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan telah mampu mempersiapkan keseluruhan yang dibutuhkan untuk memulai program ini khususnya dalam hal regulasi, pola kerja sama, dan prosedur program ini dengan baik. Sedangkan bagi PT BPR NTB Perseroda hanya perlu mempersiapkan modal pinjaman yang akan diberikan kepada penerima program tanggungan bunga pinjaman ini.

Indikator terakhir adalah Penetapan Target dan Prioritas. Sebelum melakukan penelitian ini, dari beberapa data dan sumber yang peneliti dapatkan melalui surat pra-penelitian peneliti melihat bahwa tidak adanya target yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan program tanggungan bunga pinjaman ini, serta masih ada beberapa mekanisme atau prosedur yang peneliti nilai belum jelas yakni mekanisme *waiting list* dan cara penentuan prioritas penerima program. Dengan adanya penilaian awal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan berbagai narasumber sehingga peneliti menganalisis bahwa target yang dimaksud dalam program ini adalah besaran uang atau dana yang diberikan pemerintah daerah kepada PT BPR NTB Perseroda yang harus dihabiskan setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara memberikan dana atau uang yang akan dijadikan pembayaran bunga bagi pinjaman masyarakat kepada dua lembaga keuangan yakni PT BPR NTB Perseroda Cabang Kayangan dan PT BPR NTB Perseroda Cabang Bayan. Kemudian mekanisme *waiting list* yang tidak sedikit ini disebabkan oleh kurangnya anggaran yang ada atau dana yang diberikan oleh pemerintah sebagai besaran target yang harus dihabiskan oleh pihak lembaga keuangan. Sehingga jika ada beberapa calon pemohon yang telah dinilai layak mendapatkan pinjaman ini namun dana yang tersedia untuk membayar bunga oleh pemerintah telah habis maka calon pemohon akan dimasukkan kedalam daftar tunggu atau *waiting list*. Selanjutnya adalah prioritas penerima program ini merupakan tetap

menggunakan prosedur dengan pihak lembaga keuangan dengan tambahan yakni mana yang lebih dahulu melakukan permohonan maka akan didahulukan,

b. *Dimensi Input*

Dimensi *input* atau masukan ini terdapat empat indikator didalamnya. Indikator yang pertama ialah strategi dan prosedur. Bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menggunakan strategi sosialisasi kepada masyarakat dikecamatan, desa serta dusun sehingga program ini dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat serta menggunakan selebaran atau brosur yang dibagikan dipasar pasar di Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan pihak lembaga keuangan yakni PT BPR NTB Perseroda menggunakan strategi terlebih dahulu melakukan uji SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengecek informasi mengenai calon nasabah, sehingga akan terpilah secara otomatis dan hanya perlu turun survei melakukan uji kelayakan usaha pada usaha usaha yang sudah lolos pengecekan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebelumnya sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Sarana dan Prasarana sebagai indikator kedua terlihat sangat memadai dalam mendukung proses pelaksanaan program tanggungan bunga pinjaman ini. Secara umum dalam pelaksanaannya tidak dibutuhkan sarana atau prasarana khusus untuk mendukung program ini, selain alat transportasi sebagai kendaraan oleh pihak PT BPR NTB Perseroda untuk melakukan uji kelayakan usaha pada pelaku usaha. Alat transportasi yang digunakan juga merupakan alat transportasi kantor ataupun pribadi.

Pada setiap pelaksanaan tentunya dibutuhkan sumber daya, dalam program ini Menurut keterangan dari narasumber peneliti bahwa sumber daya pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan sudah cukup baik dalam mendukung program ini baik secara kualitas atau kuantitas. Sedangkan, sumber daya yang ada PT BPR NTB Perseroda sejauh ini untuk mengelola dokumen atau hal yang berhubungan dengan administrasi sangat cukup dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mendukung program ini. Namun, pada tahun 2024 secara kuantitas PT BPR NTB Perseroda kekurangan sumber daya saat harus melakukan survei atau uji kelayakan usaha pada calon nasabah. Hal ini mengakibatkan sumber daya yang ada harus bekerja lembur hingga malam hari.

Anggaran dan biaya yang dibutuhkan dalam program ini tidak ada dibebankan oleh calon penerima, hanya saja kebutuhan untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan ditanggung masing masing. Selain itu pada seluruh prosesnya tidak diperlukan membayar apapun, kecuali sampai pada tahap pencairan kredit terdapat biaya biaya yang dibebankan kepada calon penerima kredit. Selain dari pembayaran administrasi saat pencairan, nasabah atau pelaku usaha tidak mengeluarkan biaya apapun dalam pelaksanaan program ini.

c. *Dimensi Process*

Pada dimensi *process* atau proses ini peneliti menganalisis bagaimana tahapan pelaksanaan program ini. Tahap awal dari proses pelaksanaan program ini adalah proses registrasi. Proses registrasi ini merupakan proses dimana pemohon tanggungan bunga pinjaman ini mengajukan dan memberikan berkas persyaratan kepada pemerintah yakni Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan khususnya pada bidang Koperasi. Selanjutnya pada tahap ini pemohon melampirkan dokumen dokumen administrasi yang menjadi persyaratan dalam pengajuan program ini serta memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pada tahapan proses ini tidak ada hal yang menghambat jalannya proses ini karena tahapan ini Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan hanya menerima berkas

berkas yang diajukan oleh masyarakat pelaku usaha. Sehingga tahapan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah verifikasi data permohonan yang dilakukan setelah registrasi berkas administrasi. Verifikasi berkas ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh pemohon merupakan dokumen yang benar dan sesuai kriteria. Kriteria yang diverifikasi oleh Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan adalah kriteria yang sesuai dengan ketentuan yang ada yakni dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 6 yaitu penduduk yang berdomisili dan menjalankan usahanya di daerah yang dibuktikan dengan KTP Elektronik, KK dan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta tidak pernah mendapatkan fasilitas ini selama dua tahun berturut-turut. Kemudian pemohon yang dinyatakan layak akan dimasukkan ke dalam database perangkat daerah.

Tahapan selanjutnya adalah Tahapan penilaian kelayakan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh PT BPR NTB Perseroda. Tahapan ini diberikan secara menyeluruh kepada lembaga keuangan karena dianggap paham dan tidak akan memberikan akses program ini kepada orang yang tidak layak karena akan merugikan pihak lembaga keuangan itu sendiri. Tahapan penilaian ini disesuaikan dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PT BPR NTB Perseroda. Namun, secara garis besar penilaian pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan riwayat kredit melalui SLIK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki pinjaman di bank lain dan memastikan apabila ada pinjaman di bank lain tidak mengalami penunggakan saat pembayarannya cicilan. Kemudian calon nasabah yang memiliki riwayat kredit kurang baik maka akan dipisahkan dengan calon nasabah yang memiliki riwayat kredit yang baik. Nasabah yang telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan, harus melanjutkan pada proses selanjutnya yaitu pencairan kredit atau pinjaman. Namun sebelum pencairan atau penyaluran ini dilakukan, nasabah akan dijelaskan kembali mengenai ketentuan-ketentuan pinjaman dari awal pencairan hingga proses pengembalian dana. Apabila nasabah setuju dengan seluruh SOP nya maka akan dicairkan.

d. Dimensi *Product*

Sejak Tahun 2022, sudah banyak pelaku usaha yang dapat merasakan akses dari program tanggungan bunga pinjaman ini. Pelaku usaha yang mendapatkan akses program ini pun berasal dari seluruh kecamatan yang berbeda-beda di Kabupaten Lombok Utara. Menurut Pimpinan Cabang PT BPR NTB Cabang Kayangan mengemukakan bahwa target yang ditentukan sebelumnya yang berupa dana pembayaran bunga bagi pelaku usaha itu telah dihabiskan 99%. Oleh karena itu program ini dikatakan berhasil mencapai targetnya.

Dengan adanya program ini pelaku usaha yang mendapat akses dapat mengembangkan usahanya, yang sebelumnya tidak memiliki modal menjadi memiliki modal untuk melanjutkan usahanya. Secara tidak langsung hal tersebut dapat memperbaiki ekonomi pelaku usaha dan masyarakat yang ada disekitarnya serta akan berdampak pada peningkatan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai penanggung jawab dalam program tanggungan bunga pinjaman ini juga mendapat dampak positif dengan adanya program ini. Dampak positif yang didapatkan bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ialah menjadi nilai tambah karena target yang diinginkan tercapai. Dampak positif dari program tanggungan bunga pinjaman ini dirasakan pula oleh PT BPR NTB Perseroda sebagai lembaga keuangan yang terlibat dalam program ini yakni dengan adanya program ini memberikan dampak positif berupa jumlah nasabah yang meningkat dan tingkat resiko yang lebih menyebar.

Dampak *negative* yang terjadi akibat adanya program ini berupa protes masyarakat karena dinyatakan tidak layak menerima tanggungan bunga pinjaman ini. Namun protes ini hanya sekedar bertanya kepada pihak terkait dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan PT BPR NTB Perseroda tidak sampai melakukan protes dengan membuat keributan. Dapat dikatakan dampak *negative* ini muncul karena perasaan kecewa dari pelaku usaha yang belum menerima tanggungan bunga pinjaman ini.

### **3.2. Upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Program Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Lombok Utara**

Pemerintah daerah bersama PT BPR NTB terus berusaha mengupayakan untuk memaksimalkan proses pelaksanaan program tanggungan bunga pinjaman agar berjalan lebih optimal. Sehingga pelaksana program ini dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan bersama PT BPR NTB Perseroda melakukan beberapa upaya yakni Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan turut ikut serta dalam verifikasi berkas, mendahulukan uji SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) kemudian dilanjutkan survei kelayakan usaha, peninjauan kembali jumlah pinjaman serta melakukan pertemuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program tanggungan bunga pinjaman ini.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara telah memiliki standar dan sasaran yang cukup jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2022. Kesiapan lembaga pelaksana menjadi faktor penentu keberhasilan program ini, terutama karena program ini masih tergolong baru sehingga memerlukan persiapan yang matang (Rahmadani et al., 2020). Jika tahapan pelaksanaan tidak dijalankan dengan baik, maka tujuan dan sasaran program sulit tercapai secara optimal.

Faktor pendanaan juga sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Proses registrasi hingga penilaian kelayakan usaha tidak membebani pelaku usaha secara finansial, kecuali pada tahap pencairan kredit yang mengenakan biaya administrasi. Namun, adanya mekanisme waiting list akibat keterbatasan anggaran pemerintah menjadi kendala tersendiri (Damayanti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang cukup merupakan prasyarat utama agar program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha mikro.

Meskipun mayoritas pelaku usaha mampu mengikuti program dengan baik, masih ada sebagian yang tidak mampu mengangsur pinjaman karena usaha mereka bangkrut atau berhenti beroperasi (Rahmadani et al., 2020). Dampak negatif ini meskipun kecil, tetap perlu menjadi perhatian dalam evaluasi keberlanjutan program.

Selain aspek finansial, pendampingan dan pemberdayaan pelaku usaha menjadi faktor kunci keberhasilan UMKM. Penelitian Wulandari (2023) di Desa Cikujang, Subang, menegaskan bahwa pendampingan dapat mengubah mindset pelaku usaha dan membantu mereka mengatasi kendala seperti desain kemasan dan perizinan usaha sehingga usaha menjadi lebih tertata dan produk lebih menarik. Pendampingan ini menjadi pelengkap penting dalam program tanggungan bunga yang memberikan bantuan finansial.

Keberlanjutan usaha juga sangat dipengaruhi oleh orientasi bisnis yang ramah lingkungan. Studi Tjahjadi et al. (2020) menemukan bahwa orientasi pasar hijau dan inovasi hijau secara signifikan meningkatkan kinerja UMKM manufaktur. Oleh karena itu, dukungan program yang mengarah pada

pelaku usaha dengan kesadaran lingkungan di Lombok Utara dapat memperkuat dampak jangka panjang program.

Faktor manajerial juga berperan penting dalam keberhasilan program UMKM. Khurana et al. (2021) menekankan bahwa peran manajemen puncak, dukungan pemerintah, dan ketersediaan sumber daya keuangan menjadi fondasi dalam penerapan inovasi berkelanjutan. Dalam konteks program tanggungan bunga, kolaborasi lintas sektor dan peran aktif lembaga pengelola akan memperkuat efektivitas distribusi dan pemanfaatan bantuan.

Di sisi lain, Mishra et al. (2022) menunjukkan adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman bisnis dalam penerapan ekonomi sirkular oleh UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa modal usaha, meskipun disalurkan dengan bunga rendah atau tanpa bunga, tidak akan optimal tanpa disertai edukasi dan pelatihan bagi penerima manfaat.

Dalam kerangka ekonomi sirkular, Elf et al. (2022) menyoroti pentingnya kemampuan dinamis dan keterlibatan pelanggan dalam keberhasilan UMKM, khususnya di industri mode di Inggris. Ini memperkuat argumen bahwa modal usaha harus diimbangi dengan inovasi, adaptasi, dan partisipasi aktif pelanggan agar UMKM dapat bertahan di pasar yang kompetitif.

Selain itu, Mondal et al. (2023a) mengungkapkan bahwa keberhasilan kewirausahaan hijau tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga norma sosial, budaya, dan dukungan infrastruktur. Hal ini menjadi catatan penting bagi UMKM di Lombok Utara bahwa bantuan keuangan akan lebih efektif bila didukung oleh ekosistem yang mendorong integrasi keberlanjutan dan inovasi dalam praktik bisnis mereka.

Terakhir, literasi keuangan menjadi aspek yang sangat menentukan. Wahyono & Hutahayan (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan yang baik berdampak positif langsung terhadap inovasi dan kinerja bisnis UMKM. Oleh karena itu, pemahaman pelaku usaha terhadap manajemen keuangan sangat krusial agar pinjaman dapat dimanfaatkan secara produktif dan mengurangi risiko gagal bayar atau penyalahgunaan dana dalam program tanggungan bunga.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program tanggungan bunga pinjaman tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kesiapan pelaksana, tetapi juga oleh ketersediaan anggaran, pendampingan, orientasi lingkungan, manajemen yang efektif, edukasi bisnis, serta dukungan ekosistem yang terpadu.

#### **IV. KESIMPULAN**

Peneliti telah menganalisis dan dapat menyimpulkan bahwa program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro di Kabupaten Lombok Utara yang telah di evaluasi dengan teori evaluasi CIPP telah berjalan baik. Hal ini dikarenakan dari seluruh dimensi yang peneliti nilai telah berjalan dengan baik mulai dari dimensi *context* yang menjadi dasar pelaksanaan program sudah sangat jelas dan cukup lengkap, kemudian dimensi *input* yang merupakan pendukung dari program ini sudah baik walaupun terdapat kekurangan secara kuantitas dalam pelaksanaan program namun tidak sampai menghambat dalam proses mencapai tujuan program. Dimensi *process* yang sangat jelas dan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing oleh lembaga pelaksana dan belum ada hambatan yang ada. Lembaga pelaksana juga terus melakukan evaluasi agar seluruh tahapan dalam pelaksanaan program ini berjalan efektif dan efisien. Dimensi *product* dimana hasil dari rangkaian program ini bahwa banyak sekali dampak positif yang terlihat. tidak hanya dari masyarakat penerima namun juga pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan serta PT BPR NTB Perseroda sebagai lembaga keuangan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Serta evaluasi ini dilakukan pada program yang baru berjalan tiga tahun dan belum ada penelitian yang serupa secara keseluruhan karena ini merupakan program milik daerah.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap agar akan ada penelitian selanjutnya yang dilakukan di Kabupaten Lombok Utara mengenai program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro secara lebih mendetail.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti memberikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan serta jajarannya dan Pimpinan Cabang PT BPR NTB Perseroda Cabang Kayangan dan Cabang Bayan beserta jajarannya. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nurdin, A. (2019). *Pengembangan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia*. CV Cendekia Press.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik - legalistik - empirik - inovatif* (2nd ed.). Alfabeta.

### Karya Ilmiah

- 'Aisy, A. R., & Karniawati, N. (2024). Pemberian pinjaman dana bergulir tanpa bunga dalam upaya meningkatkan perekonomian dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 3(2), 60–67. <https://doi.org/10.55850/simbol.v2i1>
- Damayanti, C. U., Agustino, L., & Maisaroh, I. (2023). Evaluasi program pengembangan industri kecil dan menengah pada pengrajin tahu di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang. *Epistemik Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 1–13. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epistemik/article/view/55087>
- Elf, P., Werner, A., & Black, S. (2022). Advancing the circular economy through dynamic capabilities and extended customer engagement: Insights from small sustainable fashion enterprises in the UK. *Business Strategy and the Environment*, 31(6), 2682–2699. <https://doi.org/10.1002/bse.2999>
- Forijati, R. (2014). Analisis model evaluasi pemberdayaan UMKM di Kediri. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 86–96. <http://journal.stie-kusumanegara.ac.id/index.php/jabm/article/view/9>

- Hidayanti, A. A., & Mandalika, E. D. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM di bidang pangan pada Kabupaten Lombok Utara pada masa pandemi Covid-19. *Agroteksos*, 32(3), 150–158. <https://jurnal.ugm.ac.id/agroteksos/article/view/66010>
- Khurana, S., Haleem, A., Luthra, S., & Mannan, B. (2021). Evaluating critical factors to implement sustainable oriented innovation practices: An analysis of micro, small, and medium manufacturing enterprises. *Journal of Cleaner Production*, 285, 125377. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125377>
- Lisnawati, T. (2023). Pertumbuhan kredit UMKM dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi (JIA)*, 9(2), 127–140. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/3077/1425/14772>
- Mishra, R., Singh, R. K., & Govindan, K. (2022). Barriers to the adoption of circular economy practices in Micro, Small and Medium Enterprises: Instrument development, measurement and validation. *Journal of Cleaner Production*, 351, 131389. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131389>
- Mondal, S., Singh, S., & Gupta, H. (2023a). Assessing enablers of green entrepreneurship in circular economy: An integrated approach. *Journal of Cleaner Production*, 388, 135999. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.135999>
- Rahmadani, I., Simin, & Indiahono, D. (2020). Implementasi program pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 8(1), 47–61. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/Asian/article/view/27560>
- Suyono, Adhayanto, O., & Subiyakto, R. (2024). Evaluasi program bantuan modal tanpa bunga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), 178–187. <https://doi.org/10.0.130.86/rfr.v%25vi%25i.5102>
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., Hariyati, H., Nafidah, L. N., Kustiningsih, N., & Nadyaningrum, V. (2020). The Role of Green Innovation between Green Market Orientation and Business Performance: Its Implication for Open Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 173. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040173>
- Wahyono, & Hutahayan, B. (2021). The relationships between market orientation, learning orientation, financial literacy, on the knowledge competence, innovation, and performance of small and medium textile industries in Java and Bali. *Asia Pacific Management Review*, 26(1), 39–46. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.07.001>
- Wulandari, S. (2023). Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 65–80. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2725>

### Website/Berita Online

- Alimi, M. (2024). Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan UMKM di Lombok Utara [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram]. [PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI LOMBOK UTARA - Ummat Repository](#)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2023). Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (miliar rupiah), 2022. <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/3/WkdVMWRYVnBkMnBvVEhKSVkyWXhNblZtTjJSbmR6MDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-barat--miliar-rupiah---2022.html?year=2022>

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024, April 30). Profil industri mikro kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022.

<https://ntb.bps.go.id/id/publication/2024/04/30/6e29d5e76f787a008a349113/profil-industri-mikro-kecil-provinsi-nusa-tenggara-barat-2022.html>

Katadata Insight Center. (2023, Januari 5). Daftar PDRB per kapita di seluruh provinsi Indonesia pada 2022: DKI Jakarta tetap jadi yang tertinggi. Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/aeb600ddec61c85/daftar-pdrb-per-kapita-di-seluruh-provinsi-indonesia-pada-2022-dki-jakarta-tetap-jadi-yang-tertinggi>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Perkembangan UMKM sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapatkan dukungan pemerintah.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>

Sipayung, R. S. G. S. (2024). Dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dan proyeksi tantangan 2024. <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>

